



RSUD Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

RSUD Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya berkenaan dengan amanat Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan penerapan secara penuh penganggaran berbasis kinerja dan peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan laporan kinerja menjadi sangat penting artinya dalam melihat kinerja suatu instansi.

Laporan Kinerja RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto menyajikan secara rinci langkah-langkah yang telah dilakukan selama satu tahun yaitu tahun 2020. Sesuai dengan Renstra RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo dengan Indikator Kinerja. Sebagai tolak ukur capaian kinerja dan realisasinya selama satu tahun. Melalui LKjIP, RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto berusaha menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Mojokerto, Januari 2021

Plt. DIREKTUR
RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo
Kota Mojokerto
Selaku Pengguna Anggaran



dr. TRIASTUTIK SRI PRASTINI, Sp.A
Pembina Tingkat I
NIP. 19660513 199707 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM	4
C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA SKPD.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. RENCANA STRATEGIS	11
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	18
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	18
C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020	32
D. PERBADINGAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN	35
BAB IV PENUTUP	36
A. KESIMPULAN.....	36
B. UPAYA PERBAIKAN.....	37
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.....	14
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020	16
Tabel 3.1	Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	18
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis-1 Tahun 2016 – 2020	19
Tabel 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.....	28
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis-2 Tahun 2016 – 2020	31
Tabel 3.5	Realisasi Pendapatan RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2016 - 2020	33
Tabel 3.6	Pagu dan Realisasi Anggaran RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020	34
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2020	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto	5
------------	---	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Realisasi BOR Tahun 2016 – 2020	20
Grafik 3.2	Realisasi ALOS Tahun 2016 – 2020	21
Grafik 3.3	Realisasi TOI Tahun 2016 – 2020.....	23
Grafik 3.4	Realisasi BTO Tahun 2016 – 2020	24
Grafik 3.5	Realisasi GDR Tahun 2016 – 2020.....	25
Grafik 3.6	Realisasi NDR Tahun 2016 – 2020	27
Grafik 3.7	Realisasi SKM Tahun 2016 – 2020	29
Grafik 3.8	Realisasi SPM Tahun 2016 – 2020.....	30
Grafik 3.9	Realisasi CRR Tahun 2016 – 2020	32

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas menjadi kata penting bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Tuntutan dipenuhinya akuntabilitas sebagai akibat gerakan konsumen, keinginan pada profesional untuk meningkatkan mutu pelayanan, kesadaran akan praktek manajemen atau tatakelola yang baik dan pengakuan masyarakat atas penghargaan kinerja organisasi (rumah sakit).

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh di bawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak.

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun.